

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Rika Sekar Indah and , Drs. Wahyono, M.A, Akt. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk Miskin terhadap Belanja Bantuan Sosial (Studi Empiris Se-Pulau Jawa 2017)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang Tahun 2019*. Kabupaten Magelang: BPS Kabupaten Magelang.
- Badrudin, Rudy. 2011. *Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Buletin Ekonomi, Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi Pembangunan, 9(1), h: 23-30.
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 10 Tentang Belanja Bantuan SosialS
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah; Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id>
- Kasmadi & Sunariah, Siti, Nia. 2013. *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Oksiana, Amira Jati. 2019. *Pengaruh Total Pendapatan Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah dan Indeks Pembanguna Manusia terhadap Alokasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Belanja Bantuan Sosial. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Ritonga, Irwan Taufiq, and Mansur Iskandar Alam. 2010. "Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)." Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto. Diakses 2021. [http://stiepena.ac.id/wpcontent/uploads/2011/11/ASP\\_05.pdf](http://stiepena.ac.id/wpcontent/uploads/2011/11/ASP_05.pdf).
- Santoso, Singgih. 2002. *Sstatistik Multivariant: Buku Latihan SPSS*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Santoso, Singgih. 2010. *Statistik Parametrik: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sasana, Hadi. 2012. Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 25(1).
- Sendouw, Aguestien & Vekie, Debby. 2019. *Pengaruh Belanja Modal, Belanja Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol 18, No.5.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- United Nations Development Programme. 1993. Human Development Report 1993. New York: Oxford University Press. Diakses Juni 3, 2021. [http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/222/hdr\\_1993\\_en\\_complete\\_nostats.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/222/hdr_1993_en_complete_nostats.pdf)
- Waruwu, Seri Jefry Adil. (2016). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah dan Investasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995-2014*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Widiagma, Aditya Putra. (2015). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*. Jember: Repository Universitas Jember.